

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, N. M., & Hidayat, M. T. (2024). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo. *JAKA (Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Auditing)*
- Andeka, R., Hernadianto, & Febriansyah, E. (2023). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Talang Buai Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko. *Realible Accounting Journal*.
- Andia Dekrita, Y., Vigula Wisang, I., & Noviyanti Selan Uran, T. (2022). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Pantai Oa Kecamatan Wulanggintang Kabupaten Flores Timur. *Aksioma: Jurnal Manajemen*.
- Budiarti, P. A., & Retnani, E. D. (2021). Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Leminggir Kecamatan Mojosar. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*.
- Bungaeja, N. A., Haliah, & Nirwana. (2024). Accountability and Transparency in The Management of Village Fund Allocation. *Return : Study of Management, Economic and Bussines*.
- Elviza, S. (2023). *Terdakwa Korupsi Dana Desa, Mantan Kades Tanah Periuk Divonis 5 Tahun Penjara*. Jambi-Independent.Co.Id.
- Farida, V., Jati, A. W., & Harventy, R. (2018). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang. *Jurnal Akademi Akuntansi*.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*.
- Guevarrato, G. (2021). *Mekanisme dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD)*. What You Pay Indonesia.
- Haliah, Febriani, A., & Kusumawati, A. (2023). The Influence of Implementing Accountability on the Management of Village Fund Allocation. *International Journal of Social Science and Human Research*.
- Halim, A. (2007). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.
- Halim, A. (2016). *Manajemen Keuangan Daerah (Revisi)*. Salemba Empat.
- Harun, H., & Purnomo, E. P. (2019). *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa*. UPP STIM YKPN.
- Hidayati, N. (2016). *Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Sidorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo*.

- Jaya, A. R., & Muslimin. (2023). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Punagaya Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto. *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum (JADBISFISH)*.
- Maghfiroh, S., & Pramuka, B. A. (2022). Penatausahaan Keuangan Desa Dalam Rangka Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban. *Jurnal Pengabdian Bisnis Dan Akuntansi (JPBA)*.
- Mais, R. G., Nuryati, T., Handoko Sakti, S., & Lestari. (2024). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Dan Governance*.
- Mantan Kades Di Jambi Ditahan Polisi Terkait Korupsi Dana Desa*. (2024). Sumatrazone.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik* (Mardiasmo (Ed.)). Yogyakarta: Andi (Anggota IKAPI).
- Ningsih, W., Arza, F. I., & Sari, V. F. (2020). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Pada Empat Desa Dalam Empat Kecamatan di Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*.
- Nuraeni, I., & Kusuma, T. G. B. (2021). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Alokasi Dana Desa Studi Kasus di Desa Sukamahi Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor pada Tahun 2020. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*.
- Parhusip, P. T., & Girsang, C. (2023). Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Bongkaras Kecamatan Silima Pungga-Pungga, Kabupaten Dairi. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*.
- Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 65 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Muaro Jambi, Pub. L. No. 65 (2018).
- Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Peraturan Desa, Pub. L. No. 14, 1 (2002).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pub. L. No. 20, 20 1 (2018).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Pub. L. No. 37, 1 (2007).
- Peraturann Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pub. L. No. 43, 1 (2014).
- Rachman, D. A., Purnamasari, H., & Gumilar, G. G. (2024). Accountability for Management of Village Fund Allocations in Klari Village , Karawang Regency

for 2020 – 2021 A village is an area inhabited by a group of people who know each other , live together and tend Law No . 32 of 2004 concerning Regional Governme. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)*.

Rahmatyah, S. (2023). Akuntabilitas pelaksanaan Alokasi Dana Desa Dalam pembangunan di Wilayah Kecamatan Loea (Studi Di Desa Lamoare Kecamatan Loea Kabupaten Kolaka Timur). *Journal of Social Science Research*.

Rosana, D. (2023). *Kejati Jambi Tangani Belasan Kasus Korupsi Dana Desa selama 2022*. Antara Jambi.

Sanusi, A. (2011). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Salemba Empat.

Sarsiti. (2020). *Akutansi Sektor Publik* (Komarudin, V. Fransisca, & R. B. Fahrezi (Eds.); September). CV. GREEN PUBLISHER INDONESIA.

Subroto, A. (2009). *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008)*. Universitas Diponegoro Semarang.

Sugiyono. (2019). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Sutopo (Ed.); September). ALFABETA, cv.

Sulistyawati, W., Wahyudi, & Trinuryono, S. (2022). Analisis (Deskriptif Kuantitatif) Motivasi Belajar Siswa Dengan Model Blended Learning Di Masa Pandemi Covid19. *Kadikma*.

Suparyanto dan Rosad. (2020). *Skala Pengukuran Dan Instrumen Penelitian*.

Susilawati, D., Parwoto, Wulaningrum, P. D., & Wijayanto, T. (2020). Good Governance Alokasi Dana Desa (ADD): Peran Perangkat dan Akuntabilitas Publik Suatu Analisis Di Desa Tirtomartani Kecamatan Kalasan Desi. *Journal of Applied Accounting and Taxation*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Pub. L. No. 32, 1 (2004).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, Pub. L. No. 33, 1 (2004).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pub. L. No. 6, 1 (2014)